



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Nomor: P.11/PKTL-SET/2015

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2016**

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut pada huruf a, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut-II/2013;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.173/Menlhk-II/2015 tentang Penunjukan Unit Induk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2016.**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja unit kerja Eselon II dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Tahun 2016;
2. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

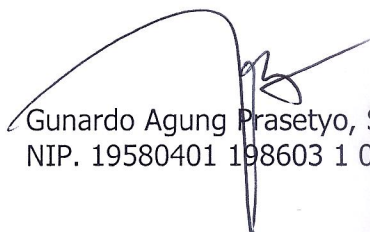
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL,

-Ttd-

**PROF. DR. IR. SAN AFRI AWANG, M.SC.
NIP. 19570410 198903 1 002**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Kerjasama Teknik,
Jakarta : 16 Desember 2015


Gunardo Agung Prasetyo, SH., M.Hum., CN
NIP. 19580401 198603 1 002

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2015

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002

DAFTAR ISI

PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Capaian Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Prognosis)	3
BAB II. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2016	7
BAB III. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016.....	17
BAB IV. PENUTUP	20
LAMPIRAN	

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Kehutanan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;

5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019, tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah ***memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional***, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Sesuai dengan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka untuk mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran dan indikator yang harus dicapai lima tahun kedepan adalah:

1. Seluruh Kawasan Hutan diakui secara Legal dan Aktual dengan indikator Seluruh Kawasan Hutan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan (Penetapan Kawasan Hutan 100%)
2. Tersedianya Data dan Informasi SDH dengan indikator Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan dengan indikator Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi dan Air 100%

4. Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung dengan indikator Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2016 bertujuan:

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2016 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Capaian Tahun 2014 dan Tahun 2015 (Prognosis)

Untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun 2016, perlu diperhatikan capaian pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan salah satu eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan hasil penggabungan antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan dengan Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karenanya untuk tahun 2014 yang merupakan tahun terakhir periode rencana strategis tahun 2010-2014, capaian kinerja merupakan capaian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Deputi Tata Lingkungan, sedangkan untuk tahun 2015, prognosis/perkiraan capaian dari rencana strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2015.

1. Capaian Tahun 2014

Penilaian capaian pelaksanaan kegiatan dari program planologi kehutanan tahun 2014 bermuara pada 6 (enam) indikator utama yaitu:

- Tata batas kawasan telah diselesaikan sepanjang 20.000 Km
- Beroperasinya 30 unit KPH Model
- Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100%
- Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu

- Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional
- Rencana makro penyelenggaraan kehutanan 1 Judul

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan Tata Lingkungan yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, bermuara pada 5 (lima) indikator yang merupakan transformasi dari indikator-indikator utama program dan kegiatan sebagai berikut:

- Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional
- Kebijakan/pedoman tentang inventarisasi SDA, penerapan ekoregion serta pemanfaatan dan pencadangan SDA
- Perangkat kajian kebijakan wilayah dan sektor
- Rekomendasi kebijakan insentif, instrumen ekonomi dan valuasi ekonomi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
- Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dokumen lingkungan dan diterbitkannya izin lingkungan

Capaian dari indikator tersebut pada tahun 2014 disajikan dalam Table berikut:

Indikator Kinerja (Utama)	Tahun 2014	
	Target	Realisasi
Tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi)	20.000 km	18.359,83 km
Beroperasinya 120 unit KPH dari 600 unit KPH	30 unit	30 unit (100%)
Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan nasional	1 Judul (Data Informasi Tahun 2014)	1 Judul (Data Informasi Tahun 2014)
Penunjukan kawasan hutan provinsi	100%	76,92%
Rencana makro penyelenggaraan kehutanan	1 Judul (Penyempurnaan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan)	1 Judul
Ijin penggunaan kawasan hutan	100%	100%
Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional	1 RPPLH Nasional dan Daerah	1 Draft RPPLH
Kebijakan/pedoman tentang inventarisasi SDA, penerapan ekoregion serta pemanfaatan dan pencadangan SDA	1 PP dan NSPK P3LH	1 Naskah Akademis RPP P3LH
Perangkat kajian kebijakan wilayah dan sektor	1 PP KLHS dan NSPK	1 RPP KLHS dan Permen LH tentang KLHS
Rekomendasi kebijakan insentif, instrumen ekonomi dan valuasi ekonomi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	1 PP Instrumen Ekonomi dan NSPK	1 RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan
Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dokumen lingkungan dan diterbitkannya izin lingkungan	63 dokumen	63 dokumen

2. Capaian Tahun 2015 (Prognosis)

Tahun 2015, merupakan tahun pertama periode pembangunan lima tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat meletakkan kondisi pemungkin bagi akselerasi pencapaian target pembangunan empat tahun berikutnya. Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015 diharapkan dapat menyiapkan instrumen dan regulasi untuk mendukung percepatan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampungnya. Capaian (prognosis) dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan/Sasaran Kegiatan Sesuai Rencana Strategis 2015-2019	Tahun 2015 (Prognosis)	
	Target	Realisasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		
1. Terelesaiakannya penetapan kawasan hutan	Tata batas 6.000 km dan penetapan 65% s/d 2015	Tata batas 6.000 km dan penetapan 65% s/d 2015
2. Terelesaiakannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan		
1. Data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH	258 KPH (100%)	258 KPH (100%)
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		
1. Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	109 KPH dan 34 Provinsi Integrasi 258 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK	97 KPH dan 34 Provinsi Integrasi 258 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK
2. Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBK Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN, dan KRP Prioritas	100 KLHS yang terjamin kualitasnya dan 100 KLHS yang tereview kelayakannya	2 KLHS kebijakan nasional didampingi (RTRW Nasional dan PTPIN) 1 KLHS RTRW Provinsi dinilai (RTRW Prov Kaltara) 100 KLHS untuk RPJMD diinisiasi sejalan Pilkada
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH	1 RPPLH Nasional,	1 RPPLH Nasional, 4 RPPLH

Kegiatan/Sasaran Kegiatan Sesuai Rencana Strategis 2015-2019	Tahun 2015 (Prognosis)	
	Target	Realisasi
Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	7 RPPLH Provinsi, dan 6 penetapan indikasi DD DT	Provinsi tersusun (DKI, Jabar, Jatim, Jateng), 1 RPPLH Provinsi diinisiasi (Kalsel)
3. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Provinsi pada Ekoregion Jawa	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Provinsi Jawa Barat (internalisasi valuasi ekonomi)
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		
1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	100%	100%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Nilai Sakip minimal 71	Nilai Sakip 71
Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan		
1. Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan pematapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Batas KH 6.000 km - Inventarisasi SDH 330 klaster - Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan KPH 109 KPH 	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Batas KH 6.000 km - Inventarisasi SDH 330 klaster - Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan KPH 99 KPH

2. KEGIATAN DAN SASARAN TAHUN 2016

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menetapkan sasaran prioritas tahun 2016 yang merupakan bagian dari kinerja program planologi kehutanan dan tata lingkungan yaitu, penetapan kawasan hutan sebesar 75% sampai dengan tahun 2016, penyediaan sistem data dan informasi sumberdaya hutan mendukung KPH di 34 Provinsi, pengendalian penggunaan kawasan hutan (optimalisasi Penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100 %) serta meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Secara rinci, kegiatan, indikator dan target untuk tahun 2016 pada Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didasarkan atas Rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan					
Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan telah selesai ditetapkan (draft usulan penetapan seluruh kawasan hutan)	10% (75%)
		Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya data dan informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka Mendukung Penetapan Kawasan Hutan	Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul
		Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Proses penetapan kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km terkendali sesuai aturan dan rencana.	8.000 km (14.000 km)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Tersusunnya regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%
	Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Tersedianya usulan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	4,1 jt ha
Terselesaikannya Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselesaikannya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Draft usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan					
Data dan informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Hasil/ Pelaksanaan Inventarisasi Sumber Daya Hutan optimal dan mendukung KPH	100 KPH (358 KPH)
		Penyusunan peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Tersusunnya peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Draft peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	100%
		Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	100%
		Penyiapan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Terselenggaranya Penyiapan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	100%
	Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi satu peta di lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Draft Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	100%
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate	Penyusunan dan update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun/terupdate	34 provinsi (update)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	setiap tahun, 34 provinsi	KPH, 34 Provinsi			
		Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Arahan pemanfaatan hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	34 provinsi
	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	100 KPH (209 KPH)
		Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Prakondisi Pembangunan 409 KPH seluruhnya dapat terwujud	100 KPH (209 KPH)
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan mendukung KPH	100 KPH (358 KPH)
		Pemantauan Penyusunan Rencana dan Kegiatan Kehutanan Provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	Rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi tersusun dan terintegrasi	34 provinsi
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	100 KPH (358 KPH)
		Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Terselesaikannya usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP pada provinsi yang mengusulkan perubahan/review	100%
	Regulasi penataan ruang kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Tersedianya regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	50%
Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani dan terkendali	100%
		Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	80%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 judul
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor					
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Terselenggaranya pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS terjamin kualitasnya setiap tahun	100 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Terselenggaranya review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS tereview kelayakannya setiap tahun	100 KLHS
Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional	Tersedianya RPPLH Nasional (1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Draft RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 dokumen arahan implementasi RPPLH
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	7 RPPLH Provinsi pada ekoregion Sumatera

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Terselenggaranya Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	RPPLH Kab/Kota yang sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	10 RPPLH Kab/Kota pada ekoregion Jawa
	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan/ terupdate	6 penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung (terbaharui)
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 satuan peta ekoregion Sulawesi
Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/ Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan					
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 % Penilaian audit lingkungan	Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 % Terselenggaranya penilaian audit lingkungan	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 % Hasil Penilaian Audit Lingkungan	100% 100%
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Terkelolanya data dan informasi kajian dampak lingkungan Tersedianya NSPK Sistem kajian dampak lingkungan	Data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas	100% 100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	Jumlah KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Daerah) dan jumlah evaluasi mutu dokumen yang disusun oleh LPJP AMDAL	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)
		Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan	50 kab/kota per tahun (60 KPA dan 20 LPJP)
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 point)	Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	4 judul
				Laporan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	6 judul
				Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan	3 judul
		Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 judul
				Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 judul
				Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	1 judul
		Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi	Tersusunnya rancangan peraturan perundangan, tertanganinya permasalahan hukum, dan terselenggaranya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	5 judul
		Laporan Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	3 judul		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016 (atau s/d 2016)
		Kehutanan dan Tata Lingkungan		Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 judul
		Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Laporan SIMAK-BMN Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan Laporan pelaksanaan monitoring SPI Laporan penyusunan TL-LHP Sistem Digital Naskah Dinas	3 judul 3 judul 22 BPKH dan 6 Satker pusat 1 laporan 22 BPKH dan 6 Satker pusat
Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan					
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	Tata batas kawasan hutan sepanjang 40.000 Km	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	8.000 km (14.000 km)
			Terbangunnya Kesepahaman Publik Terhadap Pemantapan Kawasan Hutan	Dukungan terhadap pemantapan kawasan hutan dari pihak-pihak terkait (publik)	100%
			Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Proses pemantapan kawasan hutan berjalan optimal dan terkendali sesuai rencana	100%
	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Terselesaikannya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Draft Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	100 KPH (209 KPH)
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	Inventarisasi Sumber Daya Hutan 1650 Klaster Mendukung KPH	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	Data dan Informasi sumberdaya hutan di 1650 klaster terdokumentasi	330 Klaster (660 Klaster)

Upaya pencapaian sasaran tersebut diantaranya didukung melalui kegiatan penataan batas kawasan hutan sepanjang 8.000 km terdiri dari batas luar dan batas fungsi, fasilitasi pembangunan 100 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu, pada tahun 2016 dalam rangka penyediaan data dan informasi, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga melaksanakan kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Hutan (Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP) sebanyak 330 Klaster.

A. Pelaksanaan Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 8.000 km

Pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan sepanjang 8.000 km merupakan tahap kedua dari pencapaian target penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.00 km sampai tahun 2019. Dengan target tersebut diharapkan penetapan kawasan hutan sampai 75% di tahun 2016 dan 100% di tahun 2019 dapat terwujud.

BPKH	Target Tata Batas (Km)
BPKH Wilayah I Medan	500
BPKH Wilayah II Palembang	300
BPKH Wilayah III Pontianak	984
BPKH Wilayah IV Samarinda	558
BPKH Wilayah V Banjarbaru	338
BPKH Wilayah VI Manado	385
BPKH Wilayah VII Makassar	307
BPKH Wilayah VIII Denpasar	0
BPKH Wilayah IX Ambon	249
BPKH Wilayah X Jayapura	250
BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	321
BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	513
BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	114
BPKH Wilayah XIV Kupang	233
BPKH Wilayah XV Gorontalo	162
BPKH Wilayah XVI Palu	300
BPKH Wilayah XVII Manokwari	500
BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	282
BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	331
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	61
BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	1.311
BPKH Wilayah XXII Kendari	0
Total	8.000

B. Pelaksanaan Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Fasilitasi pembangunan 100 unit KPH.

Fasilitasi pembangunan KPH diarahkan pada upaya penyiapan/prakondisi dalam rangka mendukung operasionalisasi KPH melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH. Dengan terkendalinya penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan diharapkan tata kelola hutan pada tingkat tapak lebih terintegrasi dan dapat mengakomodasi target pembangunan kehutanan nasional/provinsi pada tingkat tapak.

BPKH	Provinsi	Jumlah KPH
Wilayah I Medan	Sumatera Utara dan Sumatera Barat	9
Wilayah II Palembang	Sumatera Selatan	4
Wilayah III Pontianak	Kalimantan Barat	10
Wilayah IV Samarinda	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	8
Wilayah V Banjarbaru	Kalimantan Selatan	1
Wilayah VI Manado	Sulawesi Utara dan Maluku Utara	4
Wilayah VII Makassar	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	3
Wilayah VIII Denpasar	Bali dan Nusa Tenggara Barat	5
Wilayah IX Maluku	Maluku	4
Wilayah X Jayapura	Papua	14
Wilayah XI Jawa Madura	Jawa	-
Wilayah XII Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	1
Wilayah XIII Pangkal Pinang	Bangka Belitung dan Jambi	5
Wilayah XIV Kupang	NTT	2
Wilayah XV Gorontalo	Gorontalo	1
Wilayah XVI Palu	Sulawesi Tengah	3
Wilayah XVII Manokwari	Papua Barat	5
Wilayah XVIII Banda Aceh	Aceh	1
Wilayah XIX Pekanbaru	Riau	7
Wilayah XX Bandar Lampung	Lampung Bengkulu	1
Wilayah XXI Palangkaraya	Kalimantan Tengah	8
Wilayah XXII Kendari	Sulawesi Tenggara	4
Jumlah		100

C. Pelaksanaan Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Penyediaan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH pada 330 Klaster

Dalam rangka Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan akan dilaksanakan kegiatan Enumerasi dan Re-Enumerasi TSP/PSP dengan target sebanyak 330 Klaster. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu basis data di dalam perencanaan ruang kawasan hutan dalam rangka mendukung operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

BPKH	Enumerasi/ Re-Enumerasi (Klaster)
BPKH Wilayah I Medan	19
BPKH Wilayah II Palembang	18
BPKH Wilayah III Pontianak	28

BPKH	Enumerasi/ Re-Enumerasi (Klaster)
BPKH Wilayah IV Samarinda	26
BPKH Wilayah V Banjarbaru	3
BPKH Wilayah VI Manado	7
BPKH Wilayah VII Makassar	11
BPKH Wilayah VIII Denpasar	9
BPKH Wilayah IX Ambon	14
BPKH Wilayah X Jayapura	23
BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	19
BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	6
BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	11
BPKH Wilayah XIV Kupang	14
BPKH Wilayah XV Gorontalo	4
BPKH Wilayah XVI Palu	21
BPKH Wilayah XVII Manokwari	23
BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	17
BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	17
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	12
BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	17
BPKH Wilayah XXII Kendari	11
Total	330

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 545,8 Miliar. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2016.

3. KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016

Secara umum Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2016 diharapkan dapat memastikan minimal 75% kawasan hutan telah ditetapkan, alokasi kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dapat terkendali, regulasi satu peta dilingkungan kementerian telah selesai disusun dan dilaksanakan, 209 KPH baru telah ditetapkan areal dan dibangun kelembagaanya, RPPLH telah menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta terjaminnya kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung, serta terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan bagi usaha dan kegiatan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melaksanakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang terdiri dari 7 Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, dilaksanakan oleh satker Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
2. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dilaksanakan oleh satker Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
3. Kegiatan Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dilaksanakan oleh Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
4. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.
5. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya, dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
7. Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan, dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang tersebar di 22 Wilayah.

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Kinerja Utama Tahun 2016 (atau akumulasi s/d 2016)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
1. Terelesaikannya penetapan kawasan hutan	Tata batas 8.000 km dan penetapan 75% s/d 2016
2. Terelesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
1. Data dan informasi sumberdaya hutan terbaru di seluruh KPH	100 KPH (358 KPH sampai 2016)
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
1. Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Provinsi	100 KPH dan 34 Provinsi Integrasi 358 KPH ke dalam RTRWN, RTRWP, RTRWK, RKTN, RKTP dan RKTK
2. Penggunaan kawasan hutan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan air dengan layanan minimal 80%	Pengendalian penggunaan kawasan hutan 100% dan tercapainya pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN, dan KRP Prioritas	100 KLHS yang terjamin kualitasnya dan 100 KLHS yang tereview kelayakannya
2. Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	1 RPPLH Nasional (1 dokumen arahan implementasi RPPLH), 7 RPPLH Provinsi, 10 RPPLH Kab/Kota, 6 penetapan indikasi DD DT dan 9 satuan peta ekoregion
3. Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	100%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Nilai Sakip minimal 73
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	
1. Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Penataan Batas KH 8.000 km - Inventarisasi SDH 330 klaster - Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan 100 KPH

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan melaksanakan kegiatan tata batas dengan volume fisik yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, diantaranya yaitu tata batas kawasan hutan sepanjang 6.000 km di tahun 2015 bertambah 2.000 km sehingga menjadi 8.000 km di tahun 2016. Untuk dapat mencapai target kegiatan tahun 2016, telah direncanakan kebutuhan anggaran bagi seluruh Satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu sebesar Rp.545,8 Milyar. Oleh karenanya, apabila ketersediaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan maka dapat dipastikan target kegiatan/kinerja tahun 2016 tidak dapat tercapai 100%.

Selain ketersediaan anggaran, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sangat menyadari bahwa beberapa target yang ingin dicapai tidak akan dapat terlepas dari dukungan dan kondisi pemungkin (*enabling condition*) di dalam upaya pencapaiannya, seperti:

1. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang terdapat dalam Panitia Tata Batas;
2. Dukungan dan kerjasama Eselon I lainnya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan pembangunan dan operasional KPHP dan KPHL.
3. Dukungan penuh pemerintah daerah di dalam penyiapan kelembagaan dan syarat administrasi yang dibutuhkan untuk Pengelolaan Hutan.

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan tahun 2016 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

4. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 merupakan acuan utama bagi seluruh Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2016 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan seluruh investasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Tahun 2016, yang akan tertuang dalam DIPA TA. 2016, dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 dan DIPA TA. 2016 selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

LAMPIRAN

I. KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Program : PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Pelaksana : DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penyelesaian Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 75% Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan telah selesai ditetapkan (draft usulan penetapan seluruh kawasan hutan)	10% tambahan penetapan kawasan hutan di 2016 (akumulasi s/d 2016 sebesar 75%)	001	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I dan II
						002	Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan	Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I dan II
		Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya data dan informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka Mendukung Penetapan Kawasan Hutan	Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul	001	Penyajian Sistem Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan	
						002	Pelayanan Informasi Pengukuhan Kawasan Hutan	
						003	Pengelolaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan	
						004	Perangkat Pengolah Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan KH	
		Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 75% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 8.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Proses penetapan kawasan hutan melalui tata batas kawasan hutan 40.000 km terkendali sesuai aturan dan rencana.	8.000 km	001	Monitoring Tata Batas Kawasan Hutan	Monitoring Tata Batas Kawasan Hutan Wilayah I dan II
						002	Bimbingan Teknis Tata Batas Kawasan Hutan	Bimbingan Teknis Tata Batas Kawasan Hutan Wilayah I dan II
						003	Pemutakhiran Peta Kawasan Hutan	Pemutakhiran Peta Kawasan Hutan Wilayah I dan II
						004	Pengembangan Kerjasama Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengembangan Kerjasama Bidang Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah I dan II
						005	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan Wilayah I dan II
						006	Perangkat Pengolah Data Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan	
						007	Pengesahan Berita Acara Tata Batas (BATB)	
						008	Koordinasi perencanaan pengukuhan kawasan hutan	
Tersedianya Regulasi Kepastian Kawasan Hutan	Penyusunan/penyempurnaan regulasi kepastian kawasan hutan	Tersusunnya regulasi terkait kepastian kawasan hutan	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	100%	001	Penyusunan/penyempurnaan, pembahasan dan finalisasi regulasi kepastian kawasan hutan		
Luas kawasan hutan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Tersedianya usulan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	4,1 juta ha	001	Pembahasan dan Penelaahan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha		
					002	Penyusunan draft usulan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi/peruntukan kawasan hutan secara parsial dapat diselesaikan, 100%	Penyelesaian Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial terselenggara 100%	Terselesaikannya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Draft usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	001	Koordinasi penyelesaian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	
						002	Penyiapan draft keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan	
						003	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian, perkebunan dan non kehutanan lainnya	
						004	Penyiapan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi	
						005	Bimbingan teknis dalam rangka perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	
						006	Monitoring dan evaluasi dalam rangka tukar menukar kawasan hutan	
						007	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kewajiban pelepasan kawasan hutan	
				Good Governance Kegiatan Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai saki minimal 73	001	Pelayanan Operasional Perkantoran	
						002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan dan mesin
						003	Penyusunan Rencana Kegiatan Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
						004	Koordinasi kegiatan bidang Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
						005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

II. KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN

Program : PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Pelaksana : DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA HUTAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Data dan Informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan. 600 KPH	Penyelenggaraan Pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Hasil/Pelaksanaan Inventarisasi Sumber Daya Hutan optimal dan mendukung KPH	100 KPH	001	Penyediaan Perangkat Pengolah Data Pengendalian Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
						002	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inventarisasi SDH	
						003	Monitoring dan Evaluasi penyusunan NSDH Provinsi	
						004	Bimbingan Teknis Inventarisasi Sumberdaya Hutan	
						005	In House Training Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
						006	Uji Petik (Quality Control) Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
	Penyusunan peraturan di bidang inventarisasi dan pemantauan Sumberdaya hutan	Tersusunnya peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Draft peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	100%	001	Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang inventarisasi sumberdaya hutan		
					002	Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang pemantauan sumberdaya hutan		
	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan Mendukung KPH	Tersedianya Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	100%	001	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan Nasional		
					002	Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumberdaya Hutan KPH/Unit Pengelolaan		
					003	Penyusunan Neraca Sumberdaya Hutan Nasional		
					004	Pemetaan Tematik Sumberdaya Hutan	Diantaranya termasuk Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	
					005	Pembuatan Peta NSDH (3 Provinsi dan 6 Tematik) dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta		
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Sumberdaya Hutan Nasional	Terselenggaranya Penyiapan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	100%	001	Pengelolaan Basis Data Citra Penginderaan Jauh		
					002	Pemantauan Sumberdaya Hutan		
					003	Telaahan Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang		
					004	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemetaan		
					005	Dokumentasi Data dan Peta Tematik Kehutanan		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
						006	Sosialisasi Teknis Pemetaan Sumberdaya Hutan	
						007	Penelaahan Peta Tematik Kehutanan	
						008	Penghitungan Deforestasi Indonesia	
						009	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia	
						010	Penyediaan Sistem Informasi Spasial Sumberdaya Hutan	
						011	Pengoperasian dan Pemeliharaan Ultralight	Pemeliharaan/Operasionalisasi pesawat ultralight/mikrolight Peningkatan kemampuan tenaga pemotretan udara dengan ultralight Peningkatan kemampuan teknis ultralight/mikrolight Pemetaan udara dengan ultralight/mikrolight uji coba pemetaan udara dengan ultralight/mikrolight Pelatihan pilot ultralight/mikrolight
						012	Pelatihan Penginderaan Jauh Tingkat Lanjutan	
	Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Penyusunan Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Draft Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	1 draft regulasi satu peta (100%)	001	Penyusunan/penyempurnaan Regulasi dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta	
						002	Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	
						003	Migrasi Peta Tematik Kehutanan	
				Good Governance Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai saki minimal 73	001	Pelayanan Operasional Perkantoran	
						002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003	Penyusunan Rencana Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	
						004	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
						005	Koordinasi Kegiatan Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	

III. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Program : **PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Pelaksana : **DIREKTORAT RENCANA, PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Propinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi	Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH di 34 Provinsi tersusun/terupdate	34 Provinsi	001	Penelaahan dan pembahasan arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 provinsi
						002	Penyusunan/update peta arahan pemanfaatan hutan mendukung KPH, 34 provinsi
						003	Penyusunan/update peta pemanfaatan hutan
		Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan di 34 provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Arahan pemanfaatan hutan menjadi acuan/pedoman dalam penetapan areal pemanfaatan hutan	34 Provinsi	001	Monitoring dan evaluasi arahan pemanfaatan hutan
						002	Penyusunan pedoman/juknis/juklak terkait arahan pemanfaatan hutan
		Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 100 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Draft Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	100 KPH	001
002	Penelaahan dan pembahasan peta usulan penetapan KPH						
003	Penelaahan dan pembahasan usulan kelembagaan KPH						
004	Penyajian peta penetapan KPH						
Pengendalian Prakondisi Pembangunan 100 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH		Prakondisi Pembangunan 409 KPH seluruhnya dapat terwujud dengan optimal	100 KPH	001	Perangkat pengolah data pengendalian pembangunan KPH	
					002	Penyusunan substansi peraturan perundangan prakondisi pembangunan KPH	
					003	Koordinasi pembangunan KPH	
					004	Pengumpulan dan penelaahan data monitoring dan evaluasi pembangunan KPH	
					005	Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan KPH	
					006	Sosialisasi pembangunan KPH tingkat nasional	
					007	Pengembangan Kerjasama Pembangunan KPH dengan Mitra	
					008	Pelatihan Perencanaan Pembangunan KPH	
Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH		Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH	Perencanaan Makro Kawasan Hutan terintegrasi dan mendukung KPH	100 KPH	001	Perangkat Pengolah data pengendalian perencanaan makro kawasan hutan
						002	Integrasi Rencana Pengelolaan Tingkat Tapak dan Rencana Kehutanan Daerah dengan RKTN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan	
						003	Penyusunan/penyempurnaan peraturan bidang perencanaan makro kehutanan		
						004	Sosialisasi peraturan bidang perencanaan makro kehutanan		
						005	Evaluasi/Review RTKN Tahun 2011-2030		
			Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi	Rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi tersusun dan terintegrasi	34 Provinsi	001	Monitoring penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	
							002	Evaluasi rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	100 KPH	001	Sosialisasi Penataan Ruang Kehutanan pada Wilayah pengelolaan Hutan dalam RTRW	Sosialisasi Penataan Ruang Kehutanan Pada Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan dalam RTRW (Wilayah I dan II)
							002	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Berdasarkan RTRW	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan Berdasarkan RTRW
							003	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Mendukung 600 KPH	Pengintegrasian Rencana Ruang Kawasan Hutan ke dalam RTRW Mendukung 600 KPH (Wilayah I dan II)
							001	Penelaahan dan pembahasan usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP	Perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur
								002	Penyusunan draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP
001	Penyusunan/penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan								
Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Verifikasi dan pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Terselenggaranya Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	80%	001	Perangkat Pengolah Data PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		
						002	Pengumpulan Baseline Penggunaan Kawasan Hutan		
						003	Monitoring Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		
						004	Supervisi Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Supervisi Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, 22 BPKH	
						005	In House Training Verifikator PNBP Penggunaan Kawasan Hutan		
						006	Bimbingan Teknis Penyusunan Kelengkapan Dokumen PNBP		
						007	Koordinasi PNBP PKH dalam rangka Verifikasi Pusat dan Daerah		
		Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan terlayani dan terkendali	100%	001	Perangkat Pengolah Data Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		
						002	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
						003 Sosialisasi Kebijakan Teknis Bidang Penggunaan Kawasan Hutan	
						004 Penelaahan permohonan penggunaan kawasan hutan	
						005 Bimbingan teknis pemenuhan kewajiban IPPKH	
						006 Bimbingan teknis bidang poeggunaan kawasan hutan	
						007 Penyelesaian Lahan Kompensasi	
						008 Penyusunan substansi penyempurnaan peraturan bidang penggunaan kawasan hutan	
	Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 judul	001 Perangkat pengolah Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
						002 Penyusunan Data dan Informasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan	
						003 Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	
						004 Pengelolaan Digitalisasi Dokumen Penggunaan Kawasan Hutan	
						005 Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SI IPPKH	
						006 Supervisi Input Hasil Monev IPPKH	
						007 Pengolahan dan Analisis Data Penggunaan Kawasan Hutan	
						008 Publikasi Penggunaan Kawasan Hutan	
						009 Konfirmasi lokasi permohonan	
						010 Dokumentasi lahan kompensasi	
						010 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan KPH	Triwulan IV Tahun 2015, Triwulan I, II, III Tahun 2016
						011 Pengelolaan Web KPH	
						012 Penyelenggaraan Publikasi KPH	
						013 Penyusunan Atlas Peta KPH	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
						014	Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan	
						015	Pelayanan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan	
						016	Penyusunan Data dan Informasi Pemanfaatan hutan	Triwulan IV Tahun 2015, Triwulan I, II, III Tahun 2016
						017	Bimbingan Teknis Informasi Pemanfaatan hutan	
				Good Governance sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai sakip minimal 73	001	Layanan Perkantoran	
						002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
						003	Penyusunan Rencana Kegiatan Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
						004	Koordinasi kegiatan bidang Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
						005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	

IV. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Program : PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Pelaksana : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Terselenggaranya pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS terjamin kualitasnya setiap tahun	100 KHLS	001	Sosialisasi KLHS	
						002	Bimbingan Teknis KLHS	
						003	Penyusunan Pedoman Teknis KLHS	
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Terselenggaranya review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	100 KLHS tereview kelayakannya setiap tahun	100 KHLS	001	Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Kelayakan KLHS	
						002	Asistensi kelayakan KLHS	
Tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional (arahan implementasi RPPLH Nasional)	Tersedianya RPPLH Nasional (1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Draft RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah	1 Dokumen arahan implementasi RPPLH	001	Finalisasi dokumen RPPLH Nasional	Penyempurnaan dokumen RPPLH
						002	FGD RPPLH Nasional/arahan implementasi RPPLH	
						003	Konsultasi dan sosialisasi RPPLH Nasional	
						004	Penyusunan NSPK RPPLH	
						005	Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RPPLH Nasional	
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	7 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Sumatera	001	Bimbingan teknis Penyusunan RPPLH Provinsi	
						002	Asistensi teknis analisis spasial dan non spasial Penyusunan RPPLH Provinsi	
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kab/kota	Terselenggaranya Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	RPPLH Kab/Kota yang sesuai dengan pedoman, diterapkan dan menjadi acuan Pemerintah Daerah	10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Jawa	001	Bimbingan teknis Penyusunan RPPLH Kab/Kota	
						002	Asistensi teknis analisis spasial dan non spasial Penyusunan RPPLH Kab/Kota	
	Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada ekoregion	Penetapan dan update indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan ekoregion	Ditetapkannya indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ditetapkan/ terupdate	6 Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung (terbaharui)	001	Pembaharuan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di 5 region pulau dan 2 ekoregion kepulauan	
						002	Pengembangan NSPK Penyusunan Informasi daya dukung dan daya tampung daerah	
						003	Supervisi, verifikasi dan evaluasi penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung yang dilakukan daerah	
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Tersedianya peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	9 satuan peta ekoregion Sulawesi	001	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	
002						Pengembangan peta ekoregion pada skala 1 : 50.000		

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan				
						003	Pengembangan sistem peta ekoregion					
						004	Bimbingan teknis penerapan peta ekoregion					
						005	Sosialisasi penerapan peta ekoregion					
Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau)	Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan neraca SDA LH, valuasi ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Tersusunnya Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	1 neraca SDA LH dan PDRB Hijau kab/kota pada ekoregion Jawa	001	Penyusunan PDRB Hijau	Penyempurnaan panduan, penyusunan aplikasi, monitoring dan evaluasi				
						002	Penyusunan Neraca SDA LH	penyempurnaan panduan, penyusunan aplikasi, penyusunan adata spasial, monitoring dan evaluasi, valuasi ekonomi				
						003	Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan dan NSPK-nya	Penyempurnaan RPP IE, penyiapan penerapan ekonomi lingkungan				
						004	Peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan instrumen ekonomi lingkungan	Sosialisasi, bimbingan teknis, publikasi ekonomi lingkungan				
								Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Nilai sakip minimal 73	001	Layanan perkantoran	
							002			Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		
							003			Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
							004			Koordinasi kegiatan bidang RPencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
							005			Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		

V. KEGIATAN PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Program : PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Pelaksana : DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)		Keterangan	
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	100%	001	Persiapan penilaian dokumen AMDAL	Penilaian Rona Awal	
						002	Pelaksanaan penilaian dokumen AMDAL	Pembahasan bersama tim teknis dan komisi penilai AMDAL	
						003	Asistensi perbaikan dokumen AMDAL		
						004	Penerbitan surat keputusan kalayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup	Penyusunan draft SK Menteri LHK	
						005	Persiapan koordinasi pemeriksaan dokumen UKL-UPL	Koordinasi dan inventarisasi pemeriksaan UKL-UPL	
						006	Pelaksanaan koordinasi pemeriksaan dokumen UKL-UPL	Pemeriksaan UKL-UPL bersama stakeholder terkait	
						007	Asistensi perbaikan dokumen UKL-UPL		
						008	Penerbitan surat rekomendasi dan izin lingkungan UKL-UPL	Penyusunan draft rekomendasi Ukl-UPL (Dirjen PKTL) dan izin lingkungan (Menteri LHK)	
	Penilaian audit lingkungan	Terselenggaranya penilaian audit lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan	100%	001	Persiapan penetapan dan penilaian audit lingkungan	Penyusunan mekanisme dan penetapan kriteria resiko lingkungan untuk audit lingkungan hidup wajib berkala Inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan audit lingkungan hidup wajib berkala		
					002	Pelaksanaan penetapan dan penilaian audit lingkungan	Koordinasi, penilaian dan penyaksian pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib		
					003	Pelaporan penetapan dan penilaian audit lingkungan	Hasil evaluasi kegiatan yang memiliki permasalahan lingkungan		
					Good governance kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Nilai sakis minimal 73	001	Pengelolaan persuratan, pengarsipan dan kepegawaian	Koordinasi dan pemutakhiran data
							002	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	
							003	Penyusunan Rencana Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
							004	Koordinasi kegiatan bidang Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan	Terkelolanya data dan informasi kajian dampak lingkungan	Data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas	100%	001	Persiapan pengelolaan data dan informasi proses AMDAL, UKL-UPL serta izin lingkungan KPA Pusat dan di 34 Provinsi	Koordinasi pengembangan sistem informasi, termasuk server dan programmer
						002	Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi proses AMDAL, UKL-UPL serta izin lingkungan KPA Pusat dan di 34 Provinsi	Simulasi penginputan data dokumen lingkungan pada 6 ekoregion
						003	ReviewPelaksanaan pengelolaan data dan informasi proses AMDAL, UKL-UPL serta izin lingkungan KPA Pusat dan di 34 Provinsi	Evaluasi hasil pengembangan dan simulasi sistem informasi
	Pengembangan NSPK Sistim Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya NSPK Sistem kajian dampak lingkungan	Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas	100%	001	Persiapan penyusunan pedoman sektor skala prioritas	Penyusunan outline, studi literatur (desk study) dan penyusunan draft	
					002	Pelaksanaan penyusunan pedoman sektor skala prioritas	Penyusunan dan pembahasan draft awal dengan pihak terkait termasuk pakar	
					003	Konsultasi publik dengan instansi terkait	Melibatkan antara lain BLHD, Forum AMDAL Indonesia, Kementerian terkait, pakar	
					004	Finalisasi pedoman sektor skala prioritas	Penyusunan, pembahasan dan persetujuan draft akhir	
					005	Penerbitan pedoman sektor skala prioritas		
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi kinerja KPA Amdal Daerah, Pemeriksa UKL UPL (LH Daerah) dan LPJP Amdal	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL	50 Kab/Kota	001	Persiapan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Prov/Kab/Kota) dan LPJP AMDAL		
					002	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Prov/Kab/Kota) dan LPJP AMDAL		
003					Pasca Pelaksanaan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Prov/Kab/Kota) dan LPJP			
Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan		Terlaksananya Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan	50 Kab/Kota	001	Persiapan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		
					002	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		
					003	Pelaporan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan		

VI. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Program : PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Pelaksana : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 point)	Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Terselenggaranya Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	4 Judul	001	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017, 1 Dokumen	
						002	Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016, 1 Dokumen	
						003	Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2017, 1 Dokumen	
						004	Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 1 Dokumen	
						005	Koordinasi Program dan Anggaran dengan instansi terkait	
						006	Koordinasi Perencanaan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
				Laporan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	6 Judul	001	Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						002	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						003	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						004	Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (1 Dokumen)	
						005	Monev Pelaksanaan Rencana Aksi (1 Dokumen)	
						006	Monitoring Pelaksanaan SPI di 22 BPKH dan 6 Satker Pusat	
				Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan	3 Judul	001	Penyusunan Buletin Perencanaan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Berbasis Kawasan	
							Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri	
							Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
							Pemuktahiran Website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
							Penyusunan Buku Pintar Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan		
						002 Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015			
						003 Penyusunan Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015			
		Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1 Judul	001 Penyempurnaan Analisis Jabatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
	002 Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan								
	003 Penguatan Kelembagaan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan								
	004 Reformasi Birokrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan								
	005 Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja								
						Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	1 Judul	001 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	
					002 Konsultasi kepegawaian dengan instansi terkait				
					003 Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian				
						Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	1 Judul	001 Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
			002 Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
			003 Peningkatan Kualitas SDM Planologi Bidang Pengadaan Barang/Jasa (Angkatan I)						
			004 Bimbingan Teknis Pengembangan Pegawai Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
			005 Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional						
		Penyusunan/ pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya rancangan peraturan perundangan, tertanganinya permasalahan hukum, dan terseleenggaranya Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	5 Draft	006 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
							007 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan		
					Laporan Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan	2 Judul		008 Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
				009 Seminar Hukum Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
				Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Judul	001 Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
						002 Sosialisasi Kegiatan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
						003 Asistensi Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Kerjasama Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
		Penyusunan Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Tersusunnya Laporan SIMAK-BMN	3 Judul	001 Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perengkapan	
						002 Penyusunan Laporan Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Penyusunan laporan UAKPB semester I, II dan Tahunan
						003 Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	Inventarisasi, Pembukuan, Pengelolaan dan Pelaporan (penetapan status penggunaan, hibah, penghapusan, dll)
						004 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor	Pemeliharaan gedung kantor, peralatan mesin, kendaraan dinas dan layanan pengadaan (ULP)
				Tersusunnya Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan	3 Judul	001 Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
							Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
							Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
							Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I
						002 Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Bimbingan dan Pengendalian Administrasi Keuangan
							Sosialisasi Peraturan Perbendaharaan dan Keuangan Negara
						003 Bimbingan Teknis Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrual	
						004 Tata Kelola Administrasi Keuangan	Termasuk pengelolaan belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja satker pusat),
				Sistem digital naskah dinas, layanan penatausahaan dan persuratan	1 Dokumen	001 Penata Usahaan Naskah Dinas / Persuratan Pimpinan dan Satker	
						002 Operasional Ketatausahaan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
						003 Pengelolaan dan Penataan Kearsipan	
						004 Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
						005 Rekonstruksi Arsip Dinamis Inaktif	
				Laporan penyusunan TL-LHP	1 Dokumen	001 Penelaahan dan Pemantauan tindak lanjut LHP BPK RI dan Inspektorat Jenderal	
						002 Rapat Koordinasi Pemantauan Tindak lanjut LHP	

VII. KEGIATAN PENYIAPAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

Program : PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Pelaksana : BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I-XXII

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan			
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km	Tata batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	8.000 km	001	Identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang ditunjuk	Identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang ditunjuk untuk mendukung terlaksananya penataan batas kawasan hutan 8.000 Km		
						002	Inventarisasi Trayek batas	Inventarisasi Trayek batas untuk tata batas kawasan hutan sepanjang 8.000 Km		
						003	Pembuatan/Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan	Pembuatan Trayek batas untuk tata batas kawasan hutan sepanjang 8.000 Km di 22		
						004	Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan	Pemancangan batas Sementara dan Identifikasi Hak-Hak Pihak III untuk tata batas kawasan hutan sepanjang 8.000 Km		
						005	Pembahasan Hasil Tata Batas Sementara			
						007	Pemasangan Batas Definitif Kawasan Hutan	Pengukuran dan Pemasangan tanda Batas Definitif untuk tata batas kawasan hutan sepanjang 8.000 Km		
						008	Pembahasan Hasil Tata Batas Definitif			
						009	Supervisi Penataan Batas Kawasan Hutan			
						010	Bimbingan dan Pengawasan Penataan Batas Kawasan Hutan			
						011	Pembahasan BATB			
						012	Fasilitasi Penetapan Kawasan Hutan			
						Terbangunnya Kesepahaman Publik Terhadap Pemantapan Kawasan Hutan			Dukungan terhadap pemantapan kawasan hutan dari pihak-pihak terkait (publik)	100%
			002	Forum Koordinasi Pembangunan KPH	Forum Koordinasi Pembangunan KPH di 22 wilayah kerja BPKH					
			003	Publikasi Pemantapan Kawasan Hutan	Publikasi Pemantapan Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH					
			004	Penyusunan Buku Rencana Pemantapan Kawasan Hutan	Penyusunan Buku Rencana Pemantapan Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH					
			005	Fasilitasi Penguatan Kawasan Hutan						
			006	Publikasi Hasil Inventarisasi Sumber Daya Hutan						
			007	Koordinasi percepatan penetapan kawasan hutan						
			009	Penyusunan Sistem Data dan Informasi Pemantapan KH Berbasis Web						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
			Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan	Proses pemantapan kawasan hutan berjalan optimal dan terkendali sesuai aturan dan rencana	100%	001 Pemutakhiran Tanda Batas Kawasan Hutan (Orientasi/Rekonstruksi)	Pemutakhiran Tanda Batas Kawasan Hutan (Orientasi/Rekonstruksi) di 22 wilayah kerja BPKH
						002 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan	
						003 Pengelolaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan	Pengelolaan Dokumen Pengukuhan Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						004 Asistensi Penataan Batas Kawasan Hutan	Asistensi Penataan Batas Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						005 Pengendalian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Pengendalian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						006 Penegasan Batas Kawasan Hutan	Penegasan Batas Kawasan Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						007 Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	
						008 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Orientasi Batas Kawasan Hutan	
	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	Fasilitasi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan 409 KPH	Terselesaikannya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Draft Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan 409 KPH	100 KPH	001 Perangkat Pengolah Data Inventarisasi dan Penyusunan Tata Kelola KPH	Pengadaan perangkat pengolah data inventarisasi dan penyusunan tata kelola 100 unit KPH tahun 2016 di 22 wilayah kerja BPKH
						002 Inventarisasi Sumber Daya Hutan di wilayah KPH	Inventarisasi Sumber Daya Hutan 100 unit KPH tahun 2016 di 22 wilayah kerja BPKH Inventarisasi Biogeofisik Inventarisasi Sosial Budaya
						003 Penyusunan Rencana Tata Kelola Hutan di Wilayah KPH	Penyusunan Rencana Tata Kelola Hutan 100 unit KPH tahun 2016 Fasilitasi Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH
						004 Supervisi Inventarisasi Mendukung KPH	Supervisi Inventarisasi Mendukung KPH di 22 wilayah kerja BPKH
						005 Koordinasi penyerahan fasilitasi pembangunan KPH	
						006 Monitoring/Evaluasi Pembangunan KPH	
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1.650 Klaster	Inventarisasi Sumber Daya Hutan 330 Klaster	Tersedianya Data dan Informasi sumberdaya hutan di 1.650 klaster	Data dan Informasi sumberdaya hutan di 1.650 klaster	330 Klaster	001 Inventarisasi Sumber Daya Hutan Mendukung KPH	Kegiatan inventarisasi sumber daya hutan mendukung KPH di 22 wilayah kerja BPKH
						002 Pemetaan dengan Ultralight/Mikrolight	Pemeliharaan/Operasionalisasi pesawat ultralight/ mikrolight Peningkatan kemampuan tenaga pemotretan udara dengan ultralight Peningkatan kemampuan teknisi ultralight/mikrolight Pemetaan udara dengan ultralight/mikrolight

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan
							Uji coba pemetaan udara dengan ultralight/mikrolight
							Pelatihan pilot ultralight/mikrolight
						003 Peningkatan Teknologi Perangkat Pengolah Data ISDH	Peningkatan Teknologi Perangkat Pengolah Data ISDH di 22 wilayah kerja BPKH
						004 Publikasi Hasil Inventarisasi Sumber Daya Hutan	Publikasi Hasil Inventarisasi Sumber Daya Hutan di 22 wilayah kerja BPKH
						005 Inventarisasi Hasil Hutan Bukan Kayu	
						006 Kajian Potensi Sumber Daya Hutan	
						007 Ground Check Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang/Tinggi	
						008 Pengembangan Data Potensi Tegakan PUP Klaster Unit KPH	
						009 Pembuatan Peta Digital Tematik Kehutanan	
						010 Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang/Tinggi	
						011 Pembuatan Peta Skala Kabupaten	
						012 Sinkronisasi Data Sumber Daya Hutan	
						013 Penyusunan Database Sumber Daya Hutan	
						014 Pelaksanaan Pelatihan Pilot Tingkat Lanjutan	
						015 Pengelolaan data hasil cek lapangan	
						016 Inventarisasi hutan dalam rangka pengukuhan dan penetapan kawasan hutan	
						017 Pelayanan dan Dokumentasi Peta Kehutanan	
				Good Governance Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai saki minimal 73	001 Pelayanan Operasional Perkantoran (Belanja Pegawai + TUKIN BPKH + Belanja Operasional)	Belanja Pegawai, Tunjangan Kinerja serta belanja operasional di 22 wilayah kerja BPKH
						002 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran di 22 wilayah kerja BPKH
						003 Penyusunan Laporan Pengelolaan Satker	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Tahun 2017
							Penyusunan ROK Tahun 2016
							Penyusunan LAKIP Tahun 2015
							Penyusunan Laporan Keuangan
							Penyusunan/Pengelolaan laporan SAI, Laporan SIMAK BMN
							Penyusunan Laporan SPI
							Penyusunan statistik tahun 2015
							Penyusunan Laporan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2016	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Keterangan	
						004	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Satker di 22 wilayah kerja BPKH
						005	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran	Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran di 22 wilayah kerja BPKH
						006	Peningkatan Kapasitas SDM Satker BPKH	Peningkatan kapasitas SDM di 22 wilayah kerja BPKH
						007	Pembinaan SDM Satker BPKH	
						008	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	
						009	Seminar Kegiatan Jabatan Fungsional	
						010	Perawatan dan Pemeliharaan Kebutuhan Operasional Kantor	
						011	Gedung/Bangunan	
						012	Kendaraan Bermotor	
						013	Kegiatan Koordinator Wilayah UPT Kementerian	
						014	Rekonstruksi Arsip Dinamis	
						015	Rapat Koordinasi Pembahasan/Warsi	
						016	Upgrading verifikator PNPB-PKH	
						017	Laporan evaluasi dan Konsultasi ULP	
						018	Pengembangan Manajemen Kantor	Pengembangan manajemen kantor di BPKH